

KEMANDIRIAN BUMDes MENYONGSONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19

Studi Kasus BUMDes Citra Lestari di Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Emmie Fatkhunnajah¹, Umar Ghani²

^{1,2}STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes

Email: ¹emmie.najah@gmail.com, ²ganicomp@gmail.com

Abstrak

Kemandirian BUMDes Menyongsong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19, Studi Kasus BUMDes Citra Lestari di desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Pemerintah telah melakukan pengembangan basis ekonomi perdesaan melalui berbagai program, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sesuai keinginan. Banyak faktor yang berkontribusi pada kurangnya keberhasilan program-program ini. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi daerah terkait sikap dan langkah pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan Pembangunan Ekonomi Daerah (LED). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sarbini dalam Nugraha (2014) yang menunjukkan perlunya reorientasi pembangunan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya sekaligus mendorong roda perekonomian untuk tetap berjalan agar dampak Covid-19 tidak menghancurkan perekonomian nasional. Harus disadari bahwa proses pemulihan ekonomi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang dijalankan oleh mesin pemerintahan, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa di tingkat pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes Citra Lestari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional berbasis kemandirian pasca Pandemi Covid-19 di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kemandirian BUMDes menjadi poros alternatif pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan peranannya semakin vital. Tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, tetapi juga membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kata kunci: *Kemandirian, BUMDes, Pemulihan Ekonomi Nasional, Partisipasi, Pandemi Covid-19*

Abstract

Independence of Coporation Effort Possesion Village Towards the National Economic Recovery Post-Covid-19 Pandemic, Case Study of Citra Lestari Coporation Effort Possesion Village in Adisana village, Bumiayu District, Brebes Regency. The government has carried out the development of a rural economic base through various programs, but these efforts have not yielded the satisfactory results as desired. Many factors contributed to the lack of success of these programs. One of the most dominant factors is that government intervention is too large. The result is that it hampers the creativity and innovation of rural communities in managing and running the economic engine in rural areas. The systems and mechanisms of economic institutions in rural areas do not work effectively and have implications for dependence on government assistance so that it kills the spirit of independence. Economic independence can be started from local economic development related to the attitude and steps of the local government in designing and implementing Local Economic Development (LED). This statement is in line with Sarbini's opinion in Nugraha (2014) which suggests the need for a reorientation of development. The National Economic Recovery Program is a form of state responsibility in protecting its citizens while at the same time encouraging the wheels of the economy to keep running so that the impact of Covid-19 does not destroy the national economy. It must be realized that the process of national economic recovery is not only the responsibility of the government which is run by a machinery of government, but also the responsibility of all parties, including Village Owned Enterprises at the rural level. The purpose of this study was to determine the role of Citra Lestari Coporation Effort Possesion Village in improving the community's economy and independence-based National Economic Recovery in Adisana Village, Bumiayu District, Brebes Regency.

Keywords: *Independence, Coporation Effort Possesion Village, National Economic Recovery, Post-Covid-19 Pandemic.*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi perdesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya ialah menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi diperdesaan. Sistem dan mekanisme dari kelembagaan ekonomi pada perdesaan tidak berjalan efektif serta berimplikasi terhadap ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Pendekatan yang diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonomian perdesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut instruksi pemerintah tetapi keiinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di perdesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dikontrol bersama di mana tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Menurut Bentuk kelembagaan seperti disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian BUM Desa harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUM Desa lembaga ekonomi baru yang beroperasi di perdesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan membangun dasar pendirian BUM Desa. Dari hasil penelitian terdahulu di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat memwadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa (Nugraha, 2014). Kontribusi BUMDes bagi Pendapatan Asli Desa meningkat dari tahun ke tahun. Pendorong kontribusi BUMDes adalah kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Penghambat kontribusi adalah pandemi covid-19, dukungan pemerintah yang kurang optimal dan rendahnya kemampuan mengelola potensi desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Tata Kelola yang professional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundangan-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang professional dan idel adapat menjadi bagian dari usahan peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridlwani, 2015) Pandemi Covid-19 di awal bulan Maret 2020 yang terjadi mulai terdeteksi di seluruh di Indonesia telah berdampak tidak saja terhadap bidang kesehatan tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi yang justru mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Adanya kebijakan pemerintah mengharuskan pembatasan gerak masyarakat, mengakibatkan perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Penyebarannya yang semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan september 2019. Menurut Kementerian Desa dan PDTT (Juli Panglima Saragih, Eka Budiyanti, Sahat Anditua Fandhitya Silalahi, 2021), kebijakan pembangunan desa di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021 adalah untuk pembangunan desa yang lebih terarah. Kemendes PDTT memprogramkan SDGs Desa yang berisi 18 poin yang merupakan pengejawantahan SDGs Nasional. Target yang ditetapkan pusat antara lain adalah ada desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa dengan keterlibatan perempuan, desa dengan air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata di berbagai daerah. BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga pemulihan ekonomi desa dengan menggerakkan produksi dan konsumsi. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan, keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya (Sugiri, 2020). Strategi pemulihan ekonomi adalah mengandalkan sektor pertanian dan usaha rakyat pada komoditi yang layak bisnis, mengembangkan perdagangan dan pasar lokal, penerapan

teknologi informasi, serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai penguatan program pemulihan, harus ada kebijakan dan fasilitas dari pemerintah untuk menggerakkan dan memperlancar upaya pemulihan, serta harus melibatkan perusahaan besar yang ada di daerah untuk membantu pemberdayaan aspek bisnis pada usaha rakyat (Nasrun, 2020). Langkah-langkah yang dilakukan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Mlese berjalan cukup baik, dapat membantu masyarakat kekurangan di segi ekonomi akibat terdampak akibat Pandemi Covid-19 dengan program BUMDes yang berhubungan dengan sembako dan bahan pokok, belum berpengaruhnya hasil pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Daerah Desa Mlese dikarenakan di saat berdirinya BUMDes Mlese Maju Mandiri beriringan dengan munculnya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak berjalan maksimal dan efektif unit usaha yang dimiliki (Raharti & Ridwan, 2021). Tidak ada dampak yang material atas kondisi pandemi seperti saat ini. Fraud maupun potensi terjadinya fraud tidak sering terjadi. BUMDes mengupayakan musyawarah ketika terjadi penyimpangan dalam kegiatan operasionalnya. BUMDes diharapkan lebih peka dalam mendeteksi risiko fraud dan menerapkan pengendalian internal untuk meminimalisasi potensi fraud yang terjadi sehingga tujuan didirikannya BUMDes dapat tercapai. (Violetta, 2021). Pembentukan BUMDes memerlukan konstruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa (Raharti & Ridwan, 2021).

Dalam operasionalisasinya, BUM Desa ditopang lembaga moneter desa atau unit pembiayaan sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan kredit dan simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang oleh kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan distribusi asset kepada rakyat luas menanggulangi masalah ekonomi perdesaan. BUM Desa ialah instrument modal social (*Social capital*) diharapkan menjadi *prime over* di dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di perdesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis agar bisa mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga itu dalam perencanaan; memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan pemerintah atas (supradesa) agar menghapuskan rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa karena sektor tidak berkembang di perdesaan sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian, usaha perdagangan, dan jasa terpadu menjadi pedoman tata kelola lembaga.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi di lapangan. Menurut (prof. dr. sugiyono, 2011) "Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah". Alasan pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan: 1. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. 2. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 3. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berbentuk observasi yaitu mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan agar mengetahui lebih banyak tentang dampak dan pengelolaan BUMDes yang dilakukan di Kabupaten Brebes, dan wawancara penelitian terhadap narasumber. Narasumber meliputi Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua BUMDes, Staff BUMDes, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara tidak berstruktur kepada seluruh informan yang dipilih dengan pedoman yang sudah ditentukan dan digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Teknik analisa data yang dilakukan adalah reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemisahan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan dituangkan dalam deskripsi yang lengkap dan terperinci maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih yang pokok-pokok, dan focus pada

hal-hal yang penting dan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dan diverifikasi. Penyajian data yaitu gambaran atau bagiandari penelitian yang bertujuan untuk kemudahan peneltian. Penyajian data dituangkan dengan mendeskripsikan dari hasil wawancara dan dapat memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi terus menerus dalam proses penelitian berlangsung selama pengumpulan data. Kesimpulan dituangkan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah jika terbukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya dan penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil wawancara yaitu intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian.

Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Brebes karena pertumbuhan BUMDes sangat signifikan. Pertumbuhan signifikan terlihat pada tahun 2015 sejumlah 37, dan di tahun 2020 sejumlah 380 BUMDes yang terbentuk dan 380 BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Brebes paling banyak di Kecamatan Bumiayu yaitu sebanyak 36 BUMDes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi Ekonomi

Bumiayu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Bumiayu merupakan pusat aktivitas masyarakat di bagian selatan Kabupaten Brebes seperti Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, Salem, dan Paguyangan. Kecamatan Bumiayu yang mayoritas penduduknya petani adalah satu dari 17 Kecamatan dari Kabupaten Brebes. Bumiayu juga merupakan kota kecil yang dikelilingi pegunungan dan bukit yang indah. Ketinggian rata-rata wilayah ini adalah 690 meter di atas permukaan laut. Bumiayu memiliki 36 BUMDes.

Tabel 1. Banyaknya BUMDes di Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes, 2020

Kecamatan	BUMDes
Salem	24
Bantarkawung	17
Bumiayu	36
Paguyangan	12
Sirampog	19
Tonjong	18
Larangan	18
Ketanggungan	21
Banjarharjo	35
Losari	25
Tanjung	26
Kersana	12
Bulakamba	35
Wanasari	30
Songgom	10
Jatibarang	24
Brebes	18
Total	380

Sumber: BPS, Podes 2020

Dan sejumlah 15 yang tersebar di desa-desa Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan pemeringkatan penilaian klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dasar dan Tumbuh.

Tabel 2 Penilaian Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes				Keterangan
				Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju	
1	Adisana	Citra Lestari	53	0	1	0	0	Tumbuh
2	Bumiayu	Bayugoro	37	1	0	0	0	Dasar
3	Dukuhturi	Mandiri	43	1	0	0	0	Dasar
4	Jatisawit	Sejati	55	0	1	0	0	Tumbuh
5	Kalierang	Pancurawis	57	0	1	0	0	Tumbuh
6	Kalilangkap	Berkah Bersama	52	0	1	0	0	Tumbuh
7	Kalinusu	Berkah Jaya	35	1	0	0	0	Dasar
8	Kalisumur	Maju Makmur	49	1	0	0	0	Dasar
9	Kaliwadas	Sejahtera	57	0	1	0	0	Tumbuh
10	Langkap	Arto Multiguna	46	1	0	0	0	Dasar
11	Laren	Graha Mandiri	52	0	1	0	0	Tumbuh
12	Negaradaha	Gemah Ripah Lohjinawi	39	1	0	0	0	Dasar
13	Pamijen	Pamijen Sejen	56	0	1	0	0	Tumbuh
14	Penggarutan	Gerbang Mentari	33	1	0	0	0	Dasar
15	Pruwatan	Perintis	64	0	1	0	0	Tumbuh

Sumber : Pemerintah Kabupaten Brebes Kecamatan Bumiayu, April 2022.

Keterangan :

1. Nilai 25 - 49 Klasifikasi Dasar
2. Nilai 50 - 74 Klasifikasi Tumbuh
3. Nilai 75 - 85 Klasifikasi Berkembang
4. Nilai diatas 85 Klasifikasi Maju

BUMDes diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan (Kementerian Desa, 2021), yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masing-masing tingkat perkembangan memiliki skor yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik pula perkembangan BUMDes di suatu desa. Untuk kategori Dasar memiliki skor 25-49, Tumbuh 50-74, Berkembang 75-85, Maju memiliki skor 85 ke atas. Penetapan Skor dihasilkan dari penilaian BUMDes terkait beberapa parameter meliputi tatakelola kelembagaan, aturan, usaha, administrasi dan pelaporan, dan dampak ekonomi masyarakat. Dari tabel 2. BUMDes Citra Lestari Adisana Bumiayu berada pada klasifikasi BUMDes tumbuh yang memiliki skor 50-70 artinya bahwa BUMDes Citra Lestari memiliki pertumbuhan yang sangat bagus diantara BUMDes yang ada di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes..

BUMDes Citra Lestari mewakili kepentingan pemerintah desa sebagai upaya peningkatan layanan umum bagi masyarakat, pemanfaatan aset desa, dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Kelembagaan BUMDes Citra Lestari tidak didirikan untuk menjalankan aktivitas ekonomi produktif utama alam pemanfaatan SDA lokal. Batasan peran itu pun tampak dari arahan klasifikasi jenis usaha BUMDes Citra Lestari pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kegiatan Usaha dan Manfaat Ekonomi BUMDes Citra Lestari Adisana Bumiayu

Dampak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa	
	Tujuan	Bagi Masyarakat Desa
	Bagi Pemerintah Desa	Bagi Masyarakat Desa

	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir	Meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara tidak langsung
Hasil yang diharapkan		
Jenis Usaha	Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 (Indonesia, 2016)	Air minum desa	Terjaminnya akses air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)		sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Usaha listrik desa	Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha skala kecil dan mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
	Lumbung pangan	Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan sert mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama masa tanam
Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)	Penyewaan alat transportasi dan perkakas pesta	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup desa
	Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup desa serta termanfaatkan aset desa
Usaha Perantara/ Jasa Pelayanan (Pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)	Jasa pembayaran listrik, pemasangan wifi, pengelolaan sampah	Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik, pemasangan wifi dan kemudahan membuang sampah
	Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat	Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa serta tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar desa, diharapkan ada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat desa
Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)	Agen gas elpiji, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, konveksi, Cafe Bukit Sege Indah, perkebunan durian, agen pupuk	Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat desa dan pembukaan lapangan kerja
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)	Laku pandai Bank BPD Jawa Tengah	Diperolehnya akses kemudahan menabung dan pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, serta mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/ rentenir

<p>Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015)</p>	<p>Agro Wisata Bukit Sege Indah</p>	<p>Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan</p>
---	-------------------------------------	---

Sumber: BUMDes Citra Lestari Adisana Bumiayu, diolah 2022

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa tujuan BUMDes Citra Lestari selain dapat meningkatkan layanan umum dan optimalisasi aset desa juga berperan guna mendukung, memfasilitasi, serta mengkoordinasikan upaya ekonomi produktif masyarakat desa. BUMDes Citra Lestari bisa menjadi induk kegiatan ekowisata atau ekoturisme desa. BUMDes juga berperan penting dalam menyediakan layanan kemudahan dalam menabung dan pinjaman modal usaha skala kecil bagi usaha produktif masyarakat desa bekerja sama dengan Bank BPD Jawa Tengah. Produksi berbasis pemanfaatan SDA dilakukan masyarakat desa. Selama ini, pemanfaatan SDA selalu menajadi ruang kompetisi produksi berbasis modal di mana sebagian besar akan dikuasai oleh kekuatan modal dan jaringan pasar yang dimiliki oleh pihak swasta. Keberpihakan BUMDes pada usaha produktif masyarakat hanya mampu memberika penguatan pada kapasitas ekonomi produktif masyarakat desa, tetapi tidak bisa memberikan kunci kemenangan atas kompetisi pasar pemanfaatan SDA lokal yang selama ini terjadi. Masyarakat desa tetap tidak akan bisa bersaing dengan pihak swasta jika tidak memperkuat kelembagaan ekonominya.

4. KESIMPULAN

Kemandirian BUMDes menjadi poros alternatif pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan peranannya semakin vital. Tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, tetapi juga membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pengembangan BUMDes sudah semestinya menjadi perhatian karena di masa depan, model usaha tersebut akan berkontribusi besar bagi perekonomian baik ditingkat daerah ataupun ditingkat nasional. Keberadaan BUMDes Citra Lestari di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes menjadi bentuk optimisme tersendiri di tengah masa pandemi Covid-19. perlahan tapi pasti, usaha tersebut mampu untuk terus berkembang dan memperluas jangkauan pemasarannya. Hal tersebut seperti memberikan alternatif kebangkitan ekonomi Indonesia ditengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari BUMDes jelas terlihat betapa perannya sangat strategis sebagai salah satu satu intervensi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan desa melalui dana desa, BUMDes merupakan bentuk intervensi pelengkap yang memberikan kemungkinan pemerintah desa untuk aktif mengembangkan perekonomian lokal secara kolektif berbasis potensi serta kekuatan yang dimiliki oleh masing-masng desa.

Tidak adanya penyertaan modal masyarakat desa secara langsung pada BUMDes, sehingga tidak ada pembagian keuntungan, hasil usaha, serta manfaat ekonomi langsung untuk masyarakat desa. Masyarakat desa mendapatkan manfaat ekonomi secara tidak langsung dari operasionalisasi BUMDes. Kemudian dalam pemanfaatan SDA yang dimiliki, masyarkat desa harus dapat memperkuat produksi koletif melalui pengembangan bentuk koperasi produksi sambail memaknai keterlibatannya pada siklus tata pemerintahan desa serta dalam upaya untuk pengembangan BUMDes sebagai penyedia layanan umum dan pendukung atas usaha produksi dari berbagai kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Avilliani. (2012). Kemandirian Ekonomi. *UIN: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*.
- [2] Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–16.
- [3] David Wijaya; S.E.;M.M.. (2018). *UM desa : badan usaha milik desa*. Yogyakarta ;; © 2018: Gava Media,.
- [4] Indonesia, P. R. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016. *Jakarta*, 1–65. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016

- [5] Juli Panglima Saragih, Eka Budiyanti, Sahat Anditua Fandhitya Silalahi, T. A. S. (2021). *DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19 Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi* (A. Wayan, Prof. Dr. I Rusastra (ed.)). Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- [6] Kementerian Desa. (2021). Klasifikasi Bumdes Sesuai Tingkat Perkembangannya. *Bumdes Kajen*.
- [7] Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 32–40.
- [8] Nugraha, M. A. (2014). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi. *Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, 1–15. <http://allthesisonline.com/wp-content/uploads/2015/05/Performance-Analysis-Of-Village-Owned-Enterprises-BUMDes-And-Implications-For-Economic-Independence.pdf>
- [9] prof. dr. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive). In *Bandung Alf* (p. 143).
- [10] Raharti, R., & Ridwan, M. (2021). *Optimalisasi BUMDes Mlese Maju Mandiri Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- [11] Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- [12] Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jishundiksha.v10i3.37931>
- [13] Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- [14] Umum, K. (2014). *Lembaran Negara*. 184, 1–27.
- [15] Violetta, G. P. (2021). RESILIENSI BUMDES DALAM MENDETEKSI FRAUD DI ERA PANDEMI Pendahuluan Potensi kecurangan (fraud) disebabkan karena masih lemahnya pengendalian. *Universitas Kristen Satya Wacana*, 4(Juni), 89–104. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p89-104%0Ahttp://ejournal.uksw.edu/persi>